

ABSTRAK

Dede Mutakin: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya Nomor 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT Adhi Persada Properti vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) cabang Surabaya tentang sengketa tanah dalam perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) cabang Surabaya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya membuat putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat, sehingga Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H dan Sri Wijayawati Soebagijo mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Bekasi dan dikabulkan, pada tingkat Banding putusan Bani Surabaya tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan putusan PN Bekasi dibatalkan dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 2 tanpa melihat Pasal 70 yang menyatakan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat dapat dibatalkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024, dan untuk menganalisis akibat hukum dalam putusan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory* menjelaskan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, Teori efektivitas hukum sebagai *Middle Theory* menjelaskan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur, dan teori arbitrase sebagai *Apply Theory* menjelaskan penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau arbiter berdasarkan persetujuan para pihak.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa arbitrase menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan analisis Pasal 11. Akibat hukum dari putusan ini dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 70 menjelaskan bahwa “putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, maka putusan tersebut dapat dibatalkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Arbitrase, Tanah, Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Dede Mutakin: Analysis of Supreme Court Decision Number 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Concerning the Strengthening of the Decision of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Number 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 in Relation to Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

This research was motivated by the case of PT Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H., Maria Lucia Lindhajani S.H., and Sri Wijayawati Soebagijo vs. the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya, Haryono Soebagio and Budi Said regarding a land dispute. The Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya made an arbitration decision that contained deception, so that Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H and Sri Wijayawati Soebagijo filed for the annulment of the arbitration decision at the Bekasi District Court and was granted, at the appeal level the Bani Surabaya decision was upheld by the Supreme Court and the Bekasi District Court decision was annulled on the basis of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Article 3 and Article 11 paragraph 2 without considering Article 70 which states that an arbitration decision containing deception can be annulled.

The purpose of this study is to analyze the judge's considerations in Decision Number 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 and to analyze the legal consequences of Decision Number 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024.

The framework of thought in this research uses the theory of legal certainty to explain part of the effort to realize justice, the theory of legal effectiveness explains the benchmarks regarding appropriate and regular attitudes or behavior, and the theory of legal certainty explains the resolution or decision of disputes by a judge or arbitrator based on the agreement of the parties..

The method employed in this study is descriptive analytical with a normative juridical approach. The data sources used to answer the research questions include primary, secondary, and tertiary data sources, with data collection techniques including documentation and literature review. Based on this research, the analysis of the judge's legal considerations in deciding the arbitration dispute case uses Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Article 3 and Article 11. The legal consequences of this decision can be canceled in accordance with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Article 70 "the decision was taken from the results of deception carried out by one of the parties in the dispute examination, then the decision can be cancelled because the arbitrator's decision only has executive power after obtaining permission or an order to be executed (executoir) from the court..

Keywords: Agreement, Arbitration, Land, Alternative Dispute Resolution